

Pidato
PRESIDEN SOEKARNO

pembukaan

MEN R.I.S.

933.Perp.i.

DIMINTA KESEDIAAN PEMINDJAM

Agar sudi :

1. turut mendjaga kebersihan dan keutuhan buku ini;
2. tidak memindjamkan buku ini kepada orang lain (karena bila hilang atau rusak pemindjamlah jang harus menggantinja);
3. membawa serta buku ini ke Perpustakaan bila waktu pemindjamannja hendak diperpandjang;
4. meminta kembali bon pemindjamannja bila buku ini dikembalikan lagi ke Perpustakaan;
5. memeriksa dulu buku ini dengan teliti sebelum dibawa pulang (kalau sudah rusak atau kotor beritahukan lebih dahulu kepada pegawai jang mengurus pemindjaman buku);
6. mengembalikan buku ini selambat-lambatnja pada tanggal jang tertjantum pada label buku ini.

Perpustakaan D.P.R.-G.P

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



PIDATO PRESIDEN SOEKARNO PADA PEMBUKAAN PARLEMEN SEMENTARA R.I.S. DI DJAKARTA TANGGAL 15 FEBRUARI 1950.

Jogjakarta

Kementerian Penerangan R.I.

— 1950. —

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Pidato Presiden Soekarno pada pembukaan Parlemen R.I.S. di Djakarta, tanggal 15 Februari 1950.

Sidang jang terhormat,

M e r d e k a !

SAJA mengutjap sjukur Alhamdulillah hari ini telah dapat berhadapan muka dengan sidang Parlemen R.I.S. jang pertama. Dengan pembukaan sidang Parlemen ini, jang berarti p e r m u l a a n P a r l e m e n b e r s i d a n g maka tertanamlah suatu batu landasan untuk mengokohkan susunan dan kekuasaan negara kita, dan untuk menjempurnakan penghidupan demokrasi di Indonesia, jang masih berada dalam keadaan tumbuh.

Menurut pasal 122 dari pada Undang-undang Dasar, — jang berlaku s e m e n t a r a, sampai terbentuknja Undang-undang Dasar jang tetap oleh Konstituante, — maka Dewan Perwakilan Rakjat tak dapat mendjatuhkan Pemerintah, apabila politik jang didjalankannja tidak sesuai dengan pendapat Parlemen.

Seperti diketahui dari sedjarah timbulnja, maka peraturan ini berdasar atas pertimbangan bahwa Parlemen R.I.S. sekarang ini belum lagi mentjerminkan kemauan rakjat seluruhnja. Tetapi peraturan jang

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

belum sempurna ini tidak bermaksud akan mengurangi demokrasi !

Dalam pasal 127 Undang-undang Dasar ditegaskan, bahwa kekuasaan membuat undang-undang dilakukan dalam k e r d j a s a m a antara Pemerintah dan Parlemen. Dengan dasar itu, maka t a k d a p a t Pemerintah membuat peraturan jang mengikat rakjat d e n g a n t i a d a persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat. Selandjutnja, Dewan Perwakilan Rakjat mempunjai hak interpelasi, mempunjai hak bertanja dalam segala hal jang mengenai pemerintahan, mempunjai hak enquete. Pendek kata, Parlemen mempunjai kekuasaan dan kesempatan jang seluas-luasnja untuk mengontrol Pemerintah dalam segala tindakannja. Tidak ada Undang-undang jang dapat dibuat dengan tiada persetudjuannja. Hanja menggulingkan Pemerintah ia tak kuasa. Apabila timbul pertentangan jang hebat antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakjat, D.P.R. itu tak dapat menundjukkan Pemerintah, dan konflik terus berlaku, jang akibatnja mungkin menjusahkan djalannja pemerintahan, atau mengkakukannja sama sekali.

Tetapi, sidang jang terhormat, djanganlah kita terlalu dramatis ! Menurut hemat saja, Pemerintah sekarang ini, jang bersifat z a k e n k a b i n e t n a s i o n a l, lebih mengutamakan p e r s e s u a i a n dari pada p e r t e n t a n g a n. Pendapat jang djitu dari pihak Parlemen jang diuraikan dengan tjara jang logis dan berdasarkan bukti dan pengetahuan, pasti akan diikuti oleh Pemerintah. Saja tahu bahwa Pemerintah jang sekarang ini s u d i m e n g a l a h

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

kepada kebenaran jang lebih sempurna.

Memang tjita-tjita Parlemen dan Pemerintah pada dasarnja sama. Saja sendiri, demikian djuga beberapa anggota Pemerintah dan Parlemen, telah berkali-kali mengatakan, bahwa kemerdekaan nasional bukanlah tudjuan jang terachir bagi kita. Bagi kita, Indonesia Merdeka tak bukan dan tak lebih hanjalah sjarat untuk mentjapai kemakmuran dan kesedjahteraan rakjat, dalam arti djasmani maupun rohani.

Kemakmuran rakjat dan kesedjahteraan rakjat adalah tudjuan kita bersama. Kemakmuran rakjat dan kesedjahteraan rakjat adalah tudjuan Pemerintah dan adalah pula tudjuan Parlemen. Saja kira, dalam hal ini tak ada perbedaan-paham atau pertentangan-pendapat antara Pemerintah dan Parlemen.

Tetapi mungkin perbedaan-paham dan perlainan-pendapat akan terdapat nanti dalam hal menjelenggarakannja. Sebagai badan jang mewakili rakjat, Parlemen ingin meletakkan aksen pada tudjuan. Parlemen lebih banjak memandang kepada tudjuan. Sebaliknja Pemerintah jang dalam usahanja terikat kepada alat jang ada padanja untuk menjelenggarakan tudjuan, banjak memandang kepada kemungkinan jang terbatas. Dalam tiap-tiap tindakan jang akan didjalankannja, ia merasa pembatasan jang ditentukan oleh keadaan keuangan negara.

Bertindak dibawah pelupuk mata rakjat jang diwakilinja, maka Parlemen mudah mengemukakan

0.184

tjita-tjita, mudah sekali dan suka sekali memperlihatkan sikap jang idealistis. Malahan pengalaman perdjoangan parlementer sepandjang masa membuktikanlah bahwa hasrat jang kuat untuk membela tjita-tjita tadi mudah menimbulkan sikap demagogis.

Sebaliknja, Pemerintah jang selalu berkajuh dengan dajung jang ada, senantiasa melihatkan sikap jang realistis. Segala tjita-tita harus disesuaikan kepada keadaan jang njata, kepada keadaan jang sewadjarnja, kepada realitet, jang ditentukan oleh waktu dan ruang. Orang jang mengerdjakan, sering-sering merasa: niat hati memeluk gunung, apa daja tangan tak sampai. Itulah sebabnja, maka suatu partai jang sangat mengemukakan pendirian idealistis selama beroposisi dalam Parlemen, kalau mendjadi Pemerintah terpaksalah melepaskan sementara berbagai idealnja dan menundjukkan sikap jang realistis.

Sidang jang terhormat! Ideal memang perlu, ideal memang sangat perlu dikemukakan dalam Parlemen, karena ideal itu adalah pedoman kita bekerdja dan berdjoang. Ideal memupuk semangat bekerdja untuk menjelenggarakannja, ideal mendjadi élan vital, ideal mendjadi motor untuk menjempurnakan tjita-tjita nasional kita, jang kita bulatkan pada dua pengertian: kemakmuran rakjat dan kesedjahteraan rakjat. Ideal kita djanganlah hanja tergantung pada langit jang tinggi jang gemerlapan tjahajanja kelihatan dari djauh, tetapi hendaknja kita pula tahu djalan untuk memperhubungkannja dengan realitet, supaja realitet-besok lebih tinggi lagi duduknja dari pada reali-

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

tet-sekarang. Demikianlah hendaknja seterusnja, supaja dengan idealisme jang disesuaikan dengan realitet itu, kita dapat merobah realitet itu kedjurusan ideal kita, selangkah demi selangkah, dengan tidak berkeputusan. Dengan djalan begini, achirnja dapat kita mendorong realitet itu kedjurusan tjita-tjita mendekatkan ia kelangit jang tinggi itu, dengan tiada melupakan daratan. Orang jang mentjak-mentjak dengan h a n j a memandang tjita-tjita tinggi sadja, orang jang demikian itu sama artinja dengan orang jang mengetahui djalan bintang-bintang dilangit, tetapi tidak mengetahui djalannja sendiri diatas dunia jang njata ini !

Sekali lagi saja berkata: Idealisme memang perlu, idealisme memang berguna. Adjukanlah idealisme tuan dalam hal mentjapai kemakmuran dan kesedjahteraan rakjat, supaja idealisme tuan itu mendjadi pendorong bagi Pemerintah dalam bekerdja dan berusaha. Tetapi agar supaja idealisme itu dapat dikerdjakan hendaklah ia diadjukan dengan memperhatikan realitet jang kita hadapi sekarang, dengan mempertimbangkan bukti-bukti jang njata jang tak dapat disingkirkan atau ditiadakan dengan perkataan.

Dan,..... lebih penting lagi dari mengemukakan tjita-tjita, ialah mempunjai tekad dan kesabaran untuk m e n g a t a s i k e s u k a r a n d a n r i n t a n g a n, jang terbentang dalam menudju tjita-tjita !

Alangkah kurang-besarnja djiwa mereka jang telah pernah kita dengar mengeluarkan suara seperti berikut: „R.I.S. sudah lebih dari satu bulan berdiri,

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

tetapi apakah jang telah diperbuat oleh Pemerintah untuk mentjapai kemakmuran rakjat? Dimanakah terletaknja kekuasaan Pemerintah kalau seorang sebagai Westerling dengan beberapa pasukannja dapat mengatjau dan menimbulkan kerusakan jang begitu besar ? Kenapa Pemerintah kita bersikap begitu lemah ?"

Dan utjapan sematjam ini bisa diperbanjak lagi dengan berbagai petikan jang dapat diambil hari-hari dari berbagai surat-kabar.

Sidang jang terhormat! Dengan djiwa jang ketjil kita tidak dapat memperoleh kemenangan atas segala rintangan dan kesulitan jang terbentang ditengah djalan. Dengan djiwa ketjil kita tak dapat mentjapai tjita-tjita !

R.I.S. bukan sudah lebih dari satu bulan berdiri, melainkan R.I.S. b a r u satu bulan berdiri! Dan tak ada Pemerintah didunia ini jang sanggup mengatasi kesulitan-kesulitan jang sebesar itu didalam tempo jang pendek. Bagi orang jang tidak menutup mata, kesulitan-kesulitan jang dihadapi oleh R.I.S. pada mula berdirinja bukan sedikit. Warisan jang kita terima pada penjerahan kedaulatan bukanlah berupa negara jang aman, negara jang tenteram, negara jang makmur, jang kasnja penuh dengan mas dan berlian, melainkan adalah suatu negeri jang penuh dengan kekatjauan, jang kasnja kosong, jang reservenja habis terpakai. Sebagai akibat dari pada penerimaan kedaulatan, kita terpaksa memakan pahitnja, dan menerima berbagai-

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

bagai beban jang tidak bisa dilenjapkan dalam waktu jang singkat. Kita tak dapat meniadakan defisit dalam perbelandjaan negeri, jang sedjak empat tahun jang achir ini djumlahnja semangkin tahun semangkin besar. Pada masa jang lampau itu, semuanja itu masih dapat diatasi dengan reserve jang ada sebelum tahun 1942. Tetapi reserve itu telah habis terpakai pada penghabisan tahun 1949. Disebelah kesukaran uang jang begitu hebat, R.I.S. — sebagai akibat dari pada penerimaan kedaulatan — harus pula menanggung sebagian dari pada hutang dan tanggungan Hindia Belanda dulu. Tetapi, kalau kita mau merdeka dalam keadaan dunia sekarang jang begitu sulit, kita harus berani menghadapi segala kesukaran. Itulah tanda orang merdeka ! Tidak berketjil hati, tidak berdjiwa ketjil menghadapi kesukaran, tidak mengaduh, melainkan dengan djiwa besar kita bersedia mengatasi segala-galanja itu, dengan kepertjajaan bahwa perdjoangan kita Insja Allah pasti menang. Sedjarah empat tahun jang lalu ini menundjukkan hasil dari pada kesabaran kita, dari pada keuletan kita, dari pada tekad kita jang tak kundjung patah. Kita tidak merdjerit menghadapi kesukaran, melainkan kita berdjoang, berdjoang, dan terus berdjoang !

Sidang jang terhormat ! Berhubung dengan gerakan Westerling, saja sesali sangat bahwa ada suara-suara jang menjatakan kebingungan. Kebingungan itulah jang mendjadi sebab bahwa Pemerintah kurang mendapat bantuan moreel dan materieel, melainkan tjelaan. Alangkah bedanja pendirian rakjat dan pemuda empat tahun jang lalu, jang dalam segala

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

tjobaan dan penderitaan ia serentak berdiri dibelakang Pemerintah !

Dari semulanja Pemerintah tak mau membuang banjak perkataan terhadap soal Westerling, tak ingin membentangkan kepada umum tindakan apa jang akan diambilnja, dan tak ingin pula mendjawab segala pertanjaan tentang itu jang dikemukakan oleh berbagai djurnalis jang keinginannja memuntjak pada mentjari berita belaka, dengan melupakan kepentingan negara. Oleh karena Pemerintah tak ingin membuka rahasia siasatnja, maka Pemerintah ditjap lemah !

Tetapi, Madjelis jang terhormat, Pemerintah mempunjai k e t e g a s a n untuk Insja Allah menjapu-bersih segala pengatjau-pengatjau itu, dan j a k i n pula, Insja Allah, akan dapat mengembalikan keamanan dalam tempo jang tidak begitu lama. Dalam affaire-Madiun dulu Pemerintah telah menundjukkan ketegasannja; pertjajalah bahwa sekarang pun Pemerintah tidak kurang tegasnja. Dalam menjapu bersih pengatjau-pengatjau ini, Pemerintah tidak akan banjak bitjara, melainkan hanja akan berbuat dan menundjukkan bukti.

Sidang jang terhormat! Bahaja aksi Westerling ini tidak boleh dipandang remeh. Siapa selama ini jang memasang kupingnja dan membuka matanja, tahu bahwa aksi Westerling ini telah disiapkan oleh kaum reaksioner l a m a s e b e l u m penjerahan kedaulatan tanggal 27 Desember tahun jang lalu. Itulah sebabnja, maka gerombolan Westerling ini mempunjai alat sendjata jang lengkap, sampai kepada alat pe-

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

ngangkutan, dan sendjata besar. Maksudnja ialah akan mengadakan kekatjauan apabila R.I.S. sudah berdiri, supaja dengan itu „membuktikan", — z.g. „membuktikan" — kepada dunia bahwa bangsa Indonesia tak sanggup merdeka.

Dalam siasatnja, Westerling mempergunakan pengaruhnja dalam kalangan pasukan-pasukan jang berada dibawah komando tentera Belanda, dan mentjoba membudjuk mereka itu untuk ikut serta dalam aksinja. Organisasi Westerling ini banjak tjabang dan rantingnja, kedalam masjarakat kita dan djuga mempunjai pembantunja diluar negeri. Pemeriksaan atas diri mereka jang telah tertangkap, banjak-sedikitnja telah membukakan tabir jang menutupi rahasia gerakan tersebut. Infiltrasinja kepada gerakan Darul Islam sangat mendalam, sehingga mendjadilah tekateki bagi saja, bahwa ada orang jang berani menggabungkan nama I s l a m - s u t j i kepada gerakan pengchianat-negara dan jang dipimpin pula oleh orang jang bukan Islam. Jang mendjadi keheranan pula ialah, bahwa ada pula orang-orang jang beragama Islam, jang b e r s i m p a t i terhadap gerakan durhaka dan pengchianat ini.

Maka kepada ummat Islam jang sebenarnja, kepada ummat Islam jang betul-betul ummat Muhammad, saja berseru dari tempat ini: „Peliharalah kesutjian agama Islam, dan djauhkanlah diri dari gerakan pengatjau, dan dari pendurhakaan kepada agama dan negara, — karena Allah !

Oleh karena Pemerintah dari semulanja insaf akan sifat aksi Westerling itu, maka dalam mengambil tin-

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

dakan, Pemerintah sangat berhati-hati berhubung dengan siasat Westerling untuk mengadu-dombakan pasukan-pasukan K.N.I.L. dengan T.N.I., maka Pemerintah berusaha sebaik-baiknja untuk mendjauhkan pembenterokan itu. Sjukurlah dalam hal ini terdapat kerdja sama jang baik dengan pihak Pemerintah Belanda seperti jang ditegaskan dalam keterangan-bersama oleh Perdana Menteri Hatta dan Komisaris Agung Hirschfeld, tanggal 4 bulan ini.

Sidang jang terhormat ! Sesuai dengan tudjuan Pemerintah kedalam untuk mentjapai kemakmuran dan kesedjahteraan rakjat, maka politik Pemerintah keluar ialah memperkuat tjita-tjita perdamaian dan berusaha bersahabat dengan segala bangsa didunia ini atas dasar saling menghargai. Dasar saling menghargai sangat perlu, karena hanja diatas dasar itulah dapat dibangunkan suatu persekutuan bangsa2 jang sebenarnja, jang dapat mendjamin perdamaian internasional. Saling menghargai adalah djuga dasar bagi demokrasi, jang tidak sadja harus berlaku dalam pergaulan nasional, tetapi djuga dalam pergaulan internasional. Istimewa dalam persekutuan bangsa-bangsa dengan berbagai ideologinja, perlulah sekali adanja saling menghargai itu.

Sebab itu, selain daripada memperkuat tjita-tjita perdamaian dan mentjahari persahabatan dengan segala bangsa, apapun djuga ideologinja, harga-menghargai itu adalah sendi jang ketiga daripada politik luar negeri kita.

Sidang jang terhormat ! Seperti diketahui, Pemerintah sekarang ini adalah Pemerintah sementa-

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

r a, jang akan mendjabat sampai terbentuknja Konstituante. Oleh karena Konstituante itu sudah harus terbentuk dalam satu tahun sebagai hasil daripada pemilihan umum setjara demokrasi, maka umur Pemerintah sekarang ini pun telah ditentukan. Berhubung dengan itu maka d a f t a r u s a h a n j a pun disesuaikan dengan keadaan sementara itu.

Waktu Pemerintah R.I.S. jang pertama ini dibentuk pada tanggal 20 Desember 1949, maka programnja diumumkan.

Sekadar untuk membaharui-kembali peringatan, dan untuk mendapat pegangan dalam mempertimbangkan politik Pemerintah oleh Parlemen, maka baiklah kubatjakan disini isi program jang tudjuh fasal itu.

Demikianlah bunjinja:

1. Menjelenggarakan supaja pemindahan kekuasaan ketangan bangsa Indonesia diseluruh Indonesia terdjadi dengan saksama; mengusahakan reorganisasi K.N.I.L. dan pembentukan Angkatan Perang R.I.S. dan pengembalian tentera Belanda ke negerinja dalam waktu jang selekas-lekasnja.
2. Menjelenggarakan ketenteraman umum, supaja dalam waktu jang sesingkat-singkatnja terdjamin berlakunja hak-hak demokrasi dan terlaksananja dasar-dasar hak manusia dan kemerdekaannja.
3. Mengadakan persiapan untuk dasar hukum, tjara bagaimana rakjat menjatakan kemauannja menurut asas-asas Undang-undang Dasar R.I.S., dan

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

menjelenggarakan pemilihan umum untuk Konstituante.

4. Berusaha memperbaiki keadaan ekonomi rakjat, keadaan keuangan, perhubungan, perumahan dan kesehatan, mengadakan persiapan untuk djaminan sosial dan penempatan tenaga kembali kedalam masjarakat; mengadakan peraturan tentang upah minimum; pengawasan Pemerintah atas kegiatan ekonomi agar kegiatan itu terudjud kepada kemakmuran rakjat seluruhnja.
5. Menjempurnakan perguruan tinggi sesuai dengan keperluan masjarakat Indonesia dan membangunkan pusat kebudajaan nasional; mempergiat pemberantasan buta huruf dikalangan rakjat.
6. Menjelesaikan soal Irian dalam setahun ini djuga dengan djalan damai.
7. Mendjalankan politik luar negeri jang memperkuat kedudukan R. I. S. dalam dunia internasional dengan memperkuat tjita-tjita perdamaian dunia dan persaudaraan bangsa-bangsa.

   Memperkuat perhubungan moreel, politik dan ekonomi antara negara - negara Asia Tenggara.
   Mendjalankan olitik dalam Uni, agar supaja Uni ini berguna bagi kepentingan R. I. S.
   Berusaha supaja R.I.S. mendjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sidang jang terhormat ! Selain darimenjelenggarakan program jang terbatas itu, Pemerintah dalam lingkungan kemungkinan jang dihadapinja akan berusaha menanam dasar-dasar untuk berkembang-

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

nja kemakmuran dan kesedjahteraan rakjat. Misalnja :

koperasi dasar perekonomian rakjat; istimewa koperasi tani harus dimadjukan dengan djalan pendidikan ;

tiap warga negara berhak atas pekerdjaan dan atas penghidupan jang lajak bagi perikemanusiaan;

pembaharuan rumah kediaman rakjat;

meberantas penjakit-penjakit rakjat dan penjakit menular, dan membangun kesehatan rakjat dengan djalan pendidikan rakjat tentang kesehatannja dan meluaskan pembentukan djabatan-djabatan kesehatan kampung jang teratur;

mebangunkan pusat kebudajaan Indonesia serta memberantas buta-huruf;

transmigrasi dan industrialisasi agar supaja meratakan persebaran penduduk dan persebaran kemakmuran;

demokrasi dengan perkembangan autonomi pada bagian-bagian negara.

Sidang jang terhormat! Pada pembukaan Parlemen ini tidaklah pada tempatnja membentangkan seluruhnja rentjana usaha jang telah disusun oleh Kementerian masing-masing. Dalam membitjarakan rentjana belandja Kementerian itu masing-masing, Parlemen akan mendapat keterangan jang serba lengkap dari Menteri-menteri jang bersangkutan.

Hanja beberapa aspek sadja daripada perubahan dalam masjarakat perlu lagi saja kemukakan kepada Parlemen.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Pertama soal jang mengenai perburuhan. Kemakmuran hidup kaum buruh bukan sadja mengenai soal kemakmuran rakjat, tetapi mengenai pula keselamatan negara seluruhnja.

Dari semulanja sudah dapat diduga, bahwa penjerahan kedaulatan akan berpengaruh besar terhadap gerakan buruh di Indonesia. Perobahan politik itu diharapkan membawa perobahan-perobahan djuga jang sekaligus dapat dirasai dilapang perekonomian dan penghidupan sehari-hari. Tekanan hidup (karena umumnja upah kurang mentjukupi, berhubung dengan membubungnja harga barang-barang) lebih menggelorakan lagi nafsu menuntut perbaikan nasib.

Dalam pada itu nampak benar kurang-kesabaran dan kurang-kesanggupan untuk membatasi diri dikalangan gerakan buruh jang masih muda itu. Perobahan-perobahan jang prinsipieel sekaligus dimasukkan dalam daftar tuntutannja, disamping desakan-desakan politik, jang tidak langsung berhubungan dengan perbaikan nasib sekarang. Dalam resolusi-resolusinja, banjak kita djumpai misalnja pembongkaran pimpinan perusahaan, nasionalisasi, bahkan sampai kepada pembubaran sesuatu negara-bagian. Semua ini dapat dimengerti, karena gerakan buruh Indonesia dalam dynamik sekarang ini lebih bertalian dengan perobahan Negara dan masjarakat, daripada gerakan buruh di negeri-negeri lain.

Meskipun demikian, baik diketengahkan disini, betapa perlunja ada kesabaran dan ketenangan supaja dapat dipusatkan pikiran dan tenaga pada penjempurnaan organisasi buruh sendiri,

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

betapa perlunja mengukur kekuatan, serta memperbedakan mana tuntutan untuk djarak pandjang, mana jang dapat dikedjar dalam waktu jang dekat. Pemerintah berkejakinan, bahwa dengan mengutamakan perlengkapan dan susunan organisasi lebih dahulu, dengan memahami keadaan Negara dan masjarakat sepenuh-penuhnja, achirnja usaha gerakan buruh disini akan lebih banjak berhasil dan lebih tjepat mentjapai tjita-tjitanja.

Berdasarkan kejakinan inilah maka Pemerintah mengutamakan pokok2 pendirian seperti berikut:

Pertama, didjaga benar-benar adanja kebebasan bergerak bagi organisasi buruh. Tidak sadja kita awasi supaja djangan ada gangguan terhadap berkembangnja serikat sekerdja, tetapi atjapkali perlu djuga didjelaskan kepada kaum madjikan supaja mereka dengan tindakan dan sikap jang positif, membuka suasana-baru, hingga dalam lingkungan perusahaannja tumbuhlah organisasi buruh jang merdeka.

Betapapun beratnja tanggung-djawab Pemerintah dalam menghadapi pemogokan-pemogokan didjaman peralihan jang labil ini, Pemerintah tetap mendjauhkan segala sikap dan tindakan jang dapat diartikan membatasi hak-hak asasi daripada gerakan buruh. Dengan sistim perundingan jang tidak putus-putus antara buruh dan madjikan, Pemerintah mengichtiarkan penjelesaian. Pemerintah pertjaja, bahwa organisasi-organisasi buruh akan menghargai pendirian ini, dan akan mempergunakan kemerdekaan bergerak untuk menjusun organisasi serapih-rapihnja.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

K e d u a, Pemerintah membantu usaha kaum buruh menaikkan deradjat upah dan menaikkan ukuran penghargaan-tenaga-kerdja jang bertingkat2 mulai dengan lapisan rendah. Memang sudah seharusnja mendjadi politik tetap daripada Negara, untuk melenjapkan adanja djurang perbedaan jang dalam antara penghargaan tenaga-kerdja atasan dan bawahan, sebagai warisan djaman jang lampau.

K e t i g a, akan disiapkan dalam dua-tiga bulan jang akan datang beberapa U n d a n g - u n d a n g S o s i a l, seperti Peraturan Perdjandjian Kerdja, Undang-undang Kerdja, dan sebagainja, jang memberi perlindungan kepada kaum buruh individueel, bersamaan dengan peraturan-peraturan jang membuka kesempatan tumbuhnja organisasi-organisasi buruh jang teratur, serta aturan-aturan tentang Perdjandjian bersama tentang sjarat-sjarat kerdja (collectieve arbeidsovereenkomst). Mulai sekarang dipeladjarilah sudah persiapan Undang-undang jang mengenai djaminan sosial dan upah minimum.

K e e m p a t, mengadakan persiapan untuk dapat menempatkan sebanjak-banjaknja tenaga kembali dalam masjarakat, berdasarkan usaha-usaha pembangunan masjarakat.

Sidang jang terhormat ! Demikianlah soal buruh. Maka, soal jang hangat djuga dimasa sekarang, ialah desakan rakjat dibeberapa negara-bagian untuk menghilangkan negaranja. Ini adalah suatu buah jang menggelikan jang kita petik dari pohon jang ditanam oleh d r. v a n M o o k ! Gerakan rakjat itu ada-

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

lah suatu pernjataan dari pada b a n k r u t n j a politik-van Mook, jang menjangka bahwa dengan gampang sadja dapat dilakukan politik memetjah-belah dengan mengadakan negara-negara-bagian dengan tiada persetudjuan rakjatnja, diatas suatu negara jang sudah ada, (jaitu Republik Indonesia), jang rakjatnja merasa dirinja sudah merdeka dan sudah berdaulat. Memang, selama penghidupan politik tertekan karena adanja kekuasaan militer asing, dan selama pergerakan rakjat terbelenggu, suara oposisi itu hampir tidak kedengaran. Tetapi, serenta kemerdekaan bergerak dan bersuara hidup kembali dengan penjerahan kedaulatan kepada R.I.S., suara jang terbungkem itu mulai terdengar.

Tetapi, betapapun djuga pahitnja warisan dari masa jang lampau itu, Pemerintah akan berusaha mengendalikan tuntutan dan suara rakjat itu kedjalan jang l e g a l dan t e n t e r a m. „Gouverner C'est prévoir!" Dari pihak Parlemen diminta bantuan kepada Pemerintah sepenuh-penuhnja, supaja pemetjahan soal-soal jang disebutkan tadi dapat tertjapai dengan djalan jang sah. Tidak ada jang lebih berbahaja bagi keselamatan negeri kita, dari pada pemetjahan soal negara dengan kekatjauan. Penghargaan luar negeri jang begitu baik kepada R.I.S. sekarang, pasti akan lenjap karenanja, dan bertukar dengan keragu-raguan apakah kita ini sanggup mengadakan pemerintahan jang teratur.

Kebidjaksanaan Pemerintah dalam lapangan ini didasarkan pada Konstitusi Sementara. Konstitusi Se-

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

mentara itu terbentuk sebagai buah permufakatan dan persetudjuan bersama, mula-mula pada Konperensi Antara Indonesia, dan setelah itu pada K.M.B. Konstitusi Sementara itu telah diterima baik oleh semua daerah bagian R.I.S., diratifisir oleh badan-badan perwakilan dari daerah-daerah tersebut, ditanda tangani dengan keluhuran oleh wakil-wakil pemerintah dan badan-badan pemerintahan dari daerah-daerah tersebut !

Berdirinja Pemerintah didasarkan atas Konstitusi Sementara ini. Pemerintah telah bersumpah setia terhadap Konstitusi Sementara itu, bersumpah akan memelihara segala peraturan jang tertjantum didalamnja. R.I.S. jang merdeka dan berdaulat telah berdiri atas dasar Konstitusi Sementara itu, dan berdasarkan itulah telah mendapat pengakuan dan goodwill internasional pula!

Oleh karena itu, dalam mendjalankan kebidjaksanaan dalam-negeri, dan teristimewa dalam hal jang mengenai bentuk kenegaraan R.I.S., Pemerintah berpegang kepada ketentuan-ketentuan dalam Konstitusi Sementara itu, Pemerintah ta' dapat menjimpang dari Konstitusi itu.

Akan tetapi, ini tidak mengurangkan keinsjafan Pemerintah, bahwa bentuk kenegaraan R.I.S., sekarang bersifat s e m e n t a r a, apalagi karena Konstitusi jang kini berlaku adalah memang u n t u k s e m e n t a r a, jang bila sudah mungkin akan diganti setjara sah dengan Konstitusi jang tetap, berdasarkan atas pernjataan kemauan rakjat dengan tjara jang sah dan demokratis.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Karena itu djuga, Pemerintah segera mengadakan persiapan peraturan Undang-undang seperti jang dimaksud dalam pasal 44 Undang-undang Dasar Sementara.

Bilamana rentjana ini telah mendapat kekuatan sebagai Undang-undang, maka mugkin djuga, sebelum diadakan Konstitusi jang definitif itu, diadakanlah perubahan-perubahan setjara sah dalam bentuk kenegaraan sekarang ini, b i l a k e m a u a n r a k j a t u n t u k i t u t e l a h d i n j a t a k a n s e t j a r a s a h d a n d e m o k r a t i s.

Oleh karena itu, Pemerintah tidak dapat memberikan pendapatnja lebih dahulu pada bentuk kenegaraan terachir jang diingini oleh rakjat Indonesia, akan tetapi mau bekerdja dengan tepat dan dengan sekuat tenaga, dengan asas-asas jang tertjantum dalam Undang-undang Dasar Sementara, agar kemauan rakjat dengan setjara sah dan sungguh-sungguh demokratis dapat dinjatakan dan diwudjudkan.

Selama Konstitusi Sementara itu mempunjai kekuatan hukum, dan selama belum ada perubahan dengan tjara jang sah dalam bentuk kenegaraan, Pemerintah menghormati dan memelihara hak-hak konstitusionil dari pada pemerintah-pemerintah dan badan-badan pemerintahan daerah-daerah-bahagian R.I.S. jang telah ada.

Tetapi hal ini t i d a k menghalangi, bahwa barangkali a k a n terpaksa, bertindak terhadap Pemerintah dalam beberapa peristiwa terpaksa, dan

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

susunan kedalam dari pada beberapa daerah-bahagian!

Tetapi tindakan serupa itu hanja didjalankan, sesudah ternjata dengan tjara jang djelas dan jang mejakinkan, bahwa pengambilan tugas-kewadjiban pemerintah oleh R.I.S. dari daerah-daerah-bahagian jang bersangkutan, memang sangat perlu, dan sesudah daerah-daerah-bahagian itu telah memadjukan permohonan tentang keinginannja kepada Pemerintah, berdasarkan pasal 54 ajat 1 dari pada Konstitusi Sementara. Inisiatif Pemerintah sendiri terhadap salah satu negara bagian hanja dilakukan, djika hal itu sangat penting dan tak dapat dielakkan.

Tetapi Pemerintah berharap, mudah-mudahanlah alasan untuk itu tak akan pernah timbul, karena Pemerintah jakin bahwa, dengan pemeliharaan bentuk R.I.S. sementara selama dalam hal itu tidak diadakan perubahan jang sah, keselamatan Indonesia masih dapat terpelihara dengan tjara jang baik.

Undang-undang darurat jang telah ditetapkan oleh Pemerintah atas dasar ketentuan jang tertjantum dalam pasal 139 Konstitusi Sementara, akan segera dimadjukan kepada Parlemen untuk diperbintjangkan lebih landjut.

Sidang jang terhormat! Salah satu hal lagi jang terpenting pula ialah pemeliharaan perhubungan-perhubungan pemerintahan jang baik dan sehat.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Sebab kalau perhubungan itu tidak ada, maka timbullah kekatjauan, timbullah perpetjahan, dan pembangunan kemakmuran jang sangat penting itu takkan mungkin. Berhubung dengan itu maka perlu sekali diselesaikan selekas-lekasnja soal pemerintah-kembar (dubbelbestuur) pada beberapa daerah. Kita tak perlu lagi mengupas sebab-sebabnja; jang perlu ialah memetjahkannja. Pemerintah-kembar itu achirnja harus lenjap. Sebab dengan lenjapnja pemerintah-kembar itu, tidak sadja tertjapai r a s i o n a l i s a s i dalam pemerintahan, tetapi djuga rasionalisasi dalam pemakaian pegawai. Saja kira, ini tak dapat disangkal oleh siapapun djuga.

Maka atas usaha Pemerintah telah dibentuklah pada berbagai daerah di Djawa komisi2 bersama, jang tugas-kewadjibannja ialah mengembalikan perhubungan djawatan jang sehat. Tjara bekerdjanja ialah mengadakan permusjawaratan antara semua pihak jang bersangkutan, chususnja djuga dengan wakil-wakil daripada rakjat. Dalam pemilihan pegawai jang terus dipekerdjakan tidak sadja diperhatikan p e n g a l a m a n dan k e t j a k a p a n, tetapi djuga s i f a t m e r e k a j a n g m u r n i. Seterusnja diperhatikanlah djuga apakah mereka itu d a l a m t i m b a n g a n p o l i t i k d i t e m p a t t e r s e b u t d a p a t d i p a k a i.

Akan tetapi, penjelesaian soal dubbelbestuur mendjadi enkelbestuur ini, mempunjai djuga a s p e k s o s i a l n j a, jang harus diperhatikan benar, isti-

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

mewa oleh Pemerintah atau badan Pemerintah daerah jang bersangkutan.

Sidang jang terhormat! Sekarang sepatah kata tentang Angkatan Perang. Perlu saja memperingatkan disini, bahwa menurut keputusan Konperensi Inter-Indonesia, T.N.I.lah jang mendjadi inti-sari dari Angkatan Perang kita. Sesuai dengan keputusan itu, maka dalam persetudjuan mengenai soal-soal ketentaraan, jang tertjapai dalam K.M.B., jang disebut hanja soal reorganisasi K.N.I.L.

Setelah diumumkan Undang-undang Darurat No. 4 mengenai sjarat penerimaan anggauta Angkatan Perang R.I.S., dan Undang-undang Darurat No. 5 mengenai Peraturan Gadji Militer 1950, maka sesuai dengan bunjinja „Aturan mengenai Angkatan Darat jang ada dibawah pimpinan Belanda di Indonesia sesudah penjerahan kedaulatan", reorganisasi daripada K.N.I.L. itu dengan segera dapatlah dimulai.

Sebetulnja, sebelum itu, dari berbagai-bagai tempat di Indonesia, dari Djawa, dari Kalimantan, dari Minahasa, dari Ambon, dll., Pemerintah telah menerima permintaan dari anggauta-anggauta K.N.I.L., maupun setjara individueel, maupun setjara kesatuan-kesatuan, untuk masuk dalam Tentara Nasional, karena terdorong oleh perasaan kebangsaannja.

Maka berdasar atas suatu persetudjuan, jang terkenal dengan nama „Petundjuk-petundjuk letter A", pemasukan-lebih-dahulu itu dimungkinkan, dan kemungkinan itu dipergunakanlah pula oleh berbagai kesatuan, ja'ni V.B.-bataljon di Sumatera-Timur,

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

V.B.-bataljon di Madura, Prajoda di Bali, KNIL-kompanji di Balikpapan.

Dengan adanja sekarang Undang2 Darurat No. 4 dan 5 tadi, kami pertjaja, bahwa masuknja KNIL dalam Angkatan Perang kita, jang memang kita ingini itu, akan tjepat terdjadi, sehingga tidak lama lagi akan terbentuklah satu tentara nasional diseluruh Indonesia.

Soal masuknja para **Opsir** bangsa Indonesia dalam Tentara Nasional, sajang sekali menimbulkan banjak kesalahan-faham. Tetapi dengan gembira saja dapat menjatakan disini, bahwa kesalahan-faham itu telah diselesaikan, dengan memuaskan untuk segala fihak. Tidak lama lagi mereka akan menjumbangkan tenaganja daiam pembentukan Angkatan Perang kita.

Opsir2 bangsa kita dalam Koninklijke Marine telah lama bekerdja-sama dengan Angkatan Laut kita, menjusun Angkatan Laut Nasional jang sempurna.

Selandjutnja, perlu saja menegaskan disini, bahwa Pemerintah tetap berpendapat, bahwa Angkatan Perang adalah alat kekuasaan Pemerintah dan Negara, djadinja a-politis, hanja mendjalankan politik Pemerintah dan Negara.

Djika disana-sini terlihat tindakan tentara jang menimbulkan kesan, seolah-olah tentara ikut-serta dalam lapangan politik, maka hal itu hanjalah disebabkan kurang sempurnanja organisasi tentara dan Angkatan Perang kita.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Hendaknja djangan dilupakan, bahwa Angkatan Perang kita mula2nja ialah Agkatan Perang g e r i l j a. Menjusun Angkatan Perang jang sempurna memerlukan sedikit banjak waktu. Saja dapat menjatakan disni, bahwa dari fihak Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang, segala tenaga dan segala fikiran dipusatkanlah kepada penjempurnaan itu.

Dari chalajak ramai saja harapkan pengertian, kesabaran, dan bantuan!

Sidang jang terhormat! Sudah pada tempatnja pada pembukaan Parlemen ini Pemerintah memberikan pandangan sepintas lalu tentang k e u a n g a n n e g a r a sekarang, karena keadaan keuangan itulah jang menentukan k e m u n g k i n a n atau k e t i d a k - m u n g k i n a n n j a mendjalankan berbagai rentjana jang telah disiapkan.

Pada saat penjerahan kedaulatan, maka menurut apa jang telah disetudjui dalam Konperensi Medja Bundar, hutang Republik Indonesia Serikat adalah berdjumlah l.k. 4200 djuta rupiah, terdiri atas h u t a n g d a l a m n e g e r i sebesar l.k. 2500 djuta rupiah, dan h u t a n g k e p a d a l u a r n e g e r i sebesar l.k. 1700 djuta rupiah.

Hutang d a l a m n e g e r i, jang kita terima sebagai warisan dari Pemerintah Hindia Belanda dahulu, disebabkan oleh kekurangan2 dalam perbelandjaannja didalam tahun 1946, 1947, 1948 dan 1949; djumlah kekurangan2 itu semuanja adalah 4650 djuta rupiah. S e b a g i a n dari keku-

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

rangan2 ini dapat ditutup dengan pindjaman2 dari luar negeri dan dengan mempergunakan persediaan deviezen jang masih ada pada permulaan tahun 1946.

Dalam hutang RIS ini belum terhitung hutang2 jang seharusnja kita terima pula dari R e p u b l i k I n d o n e s i a, berupa berbagai matjam O.R.I. jang telah dikeluarkan oleh atau atas nama Pemerintah Republik, serta hutang2 lainnja seperti pindjaman nasional dan sebagainja.

Menurut kurs jang berlaku dipasar, maka hutang2 Republik itu bisa ditaksir hingga djumlah *f* 100 — f 150 djuta uang federal. Angka2 jang tepat sukarlah ditentukan, karena berbagai hal jang menjulitkan pengumpulan bahan2. Tetapi Pemerintah insjaf, bahwa n i l a i daripada hutang2 Republik Indonesia kepada rakjatnja itu, sebenarnja djauh lebih tinggi daripada nilai uang jang ditentukan menurut kurs pasar. Sebab hutang2 itu merupakan k o r b a n daripada rakjat, untuk melaksanakan t j i t a - t j i t a n j a, jang pada hakekatnja t i d a k b i s a diukur dengan nilai uang manapun djuga.

Oleh karena itu maka Pemerintah, ketjuali menerima hutang2 Republik Indonesia menurut kurs jang berlaku dipasar, jang djumlahnja tidak akan melebihi f 100.000.000.— federal, akan memberi kesempatan kepada Pemerintah Republik untuk menjelenggarakan berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha pembangunan ini akan membawa manfaat jang lebih besar bagi rakjat, daripada pengembalian uang ORI dengan uang federal semata-mata, jang hanja akan mengun-

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

tungkan kaum spekulan, kaum pedagang tjatut-uang, dan kaum pemalsu uang. Tetapi oleh karena faktor2 psychologi, maka tentunja penukaran uang ORI dengan uang federal tidak dapat dielakkan sama sekali.

Djumlah h u t a n g R I S seperti jang diuraikan diatas, dalam dua-tiga tahun jang akan datang, melihat tanda-tandanja, t i d a k a k a n b e r k u r a n g, melainkan akan bertambah, dan tidak sedikit!

Dengan dugaan sementara sadja setjara kasar, jang didasarkan atas anggaran Pemerintah prae-federal untuk pemerintahan sipil, maka k e k u r a n g a n dalam anggaran RIS menundjukkan djumlah l.k. f 2650 djuta untuk 1950. Ja'ni p e n g e l u a r a n l.k. f 4521 djuta, dan p e n e r i m a a n f 1871 djuta.

Perhatikan:

Anggaran Pemerintahan sipil menurut taksiran pemerintah prae-federal ialah sebagai berikut:

p e n g e l u a r a n	f	2596 djuta
p e n e r i m a a n	„	1871 „

mendjadi k e k u r a n g a n f 725 djuta.

Ditambah dengan p e n g e l u a r a n berhubung dengan terbentuknja RIS dan masuknja Republik Indonesia kedalam RIS, jaitu:

a. biaja2 buat TNI dan ongkos2 militer lainnja sebesar f 1325 djuta

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

b. tambahan kekurangan buat negara2-bagian (R.I.) sebesar	„	250	„	
c. departemen2 baru sebesar	„	100	„	
d. pembajaran hutang2 R.I. sebesar	„	100	„	jang saja
e. usaha2 pembangunan baru sebesar	„	150	„	sebutkan tadi itu

maka djumlah kekurangan jang f 725 djuta itu tadi mendjadi f 2650 djuta.

Tuan akan menanja: „Mana penerimaan2?"

Terhadap pengeluaran2 baru, jang menjebabkan tambahnja kekurangan menurut anggaran Pemerintah prae-federal, t i d a k dimasukkan p e n e r i m a a n 2 b a r u, oleh karena penerimaan2 jang lamapun, jang telah direntjanakan dalam anggaran Pemerintah prae-federal, mungkin akan b e r k u r a n g, berhubung dengan masa pantjaroba.

Meskipun belum ada laporan2 jang lengkap, tetapi bisa diramalkan, bahwa dalam bulan2 sebelum dan sesudah penjerahan kedaulatan, penerimaan dari bea dan tjukai, iuran negara dan lain2 sebagainja, akan merosot diseluruh lapangan fiscal, terutama didaerah-daerah di Djawa dan Sumatera.

Kekatjauan politik sebagai akibat daripada berbagai matjam pemerintahan, dengan sendirinja mempunjai pengaruh jang amat buruk bagi penerimaan

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

negara. Jang beruntung hanjalah kaum spekulan dan kaum smokkel, jang istimewa didalam masa peralihan ini, bertindak dengan amat beraninja.

Dalam pada itu Pemerintah merasa puas, bahwa dalam waktu jang singkat, berkat kerdja-sama antara Pemerintah RIS dan Pemerintah Republik Indonesia, telah tertjapailah peleburan daripada segala djawatan2 jang penting bagi penerimaan negeri, antara lain peleburan djawatan bea dan tjukai dan djawatan padjak, hingga mendjadilah suatu djawatan RIS. Dengan demikian, maka bisa diharapkan, bahwa dengan bantuan dari segala pihak, terutama dari pembesar2 militer dan Pemerintah daerah, pemungutan dari pada berbagai iuran dan tjukai bisa dikerdjakan dengan lebih sempurna.

Untuk memberantas penjelundupan, Pemerintah telah mengaktiveer pekerdjaan „smokkel-comissie" jang telah dibentuk oleh Pemerintah prae-federal dan dilandjutkan oleh Pemerintah RIS dengan merobah dan menambah anggauta2nja.

Dalam pada itu Pemerintah jakin, bahwa penjelundupan setjara besar2an seperti jang sekarang dilakukan, tidak dapat diberantas setjara effektief, apabila s e b a b 2 j a n g t e r u t a m a belum dihilangkan. Apakah sebab2 jang terpenting? Sebab2 jang terpenting itu ialah a t u r a n 2 i m p o r t d a n e x p o r t, beserta p e r a t u r a n t e n t a n g „d e v i e z e n", jang sekarang masih berlaku, dan jang mengakibatkan, bahwa kaum pedagang barang2 export lebih suka mengeluarkan

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

barangnja setjara g e l a p daripada melalui saluran2 legal!

Soal ini sedang sibuk dipeladjari oleh Pemerintah, tetapi umum harus insjaf, bahwa peraturan2 jang telah berlaku beberapa tahun, meskipun kurang baik dan patut diganti dengan suatu peraturan jang lebih baik, tidak dapat diganti begitu sadja dengan tidak mempeladjari konsekwensi2nja lebih dulu sedalam-dalamnja.

Angka2 jang tadi dikemukakan tentang anggaran negara dalam tahun ini, adalah angka2 jang sangat global. Dari suatu Pemerintah jang baru sadja beberapa minggu telah menerima pimpinan negara, tak dapat diharapkan akan segera memberi angka2 jang lebih tepat.

Pada kesempatan lain, kalau mungkin selama sidang ini djuga, Pemerintah akan menjampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat, (sambil menunggu selesainja anggaran jang definitif), suatu nota jang berisikan kiraan anggaran jang lebih mendalam dan mengandung lebih banjak detail.

Kalau sekarang, disini, dikemukakan beberapa angka, maka maksud saja jang terpenting tiada lain melainkan untuk memberi gambaran jang djelas kepada Tuan2, betapa sulitnja keadaan keuangan kita pada masa sekarang ini.

Kekurangan, jang menurut kiraan jang kasar sadja, sebagai Tuan2 tadi dengar, berdjumlah tidak kurang dari 2,5 milliard, memang mungkin dapat diturunkan dengan berbagai usaha. Tetapi mungkin

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

djuga, bahwa kekurangan itu akan ternjata lebih besar djumlahnja, apabila semua bahan2 dari berbagai kementerian, negara2-bagian, dan daerah2 kesatuan, sudah diterima semuanja.

Misalnja menurut Perdana Menteri R.I. dalam pidatonja baru2 ini didepan Badan Pekerdja, kekurangan bagi R.I. adalah f 1.409.860.000 sedangkan dalam kiraan RIS, kekurangan R.I. itu ditaksir hanja sebesar f 540 djuta!

Maka untuk memperketjil kekurangan RIS itu sampai batas2 kemungkinan jang terachir bagi Pemerintah adalah beberapa djalan.

Diantaranja ialah:

1. M e n g a d a k a n r a s i o n a l i s a s i dalam s u s u n a n N e g a r a, dan dalam badan2 dan alat2 Pemerintahan. Struktuur daripada negara kita sebagai federasi, pada prinsipnja mungkin dipertahankan. Tetapi kalau federasi itu terdiri dari bagian2 jang djumlahnja dan susunannja tidak sesuai dengan kenjataan, maka bentuk negara kita sebagai federasi itu adalah suatu k e m e w a h a n j a n g l u a r - b i a s a bagi rakjat Indonesia, jang tak mungkin dibajar oleh rakjat itu melihat kepada kemampuannja. Tak mungkin! Tak mungkin materieel! Tak mungkin personeel!

Sekarang djumlah pegawai sipil adalah ± 420.000 orang (180.000 pegawai federal dan 240.000 pegawai Republik). Apabila dalam 6 bulan jang pertama djumlah ini dapat diturunkan sampai 220.000 orang (jang masih 100.000 orang lebih banjak daripada sebe-

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

lum perang), maka penghematan jang akan ditjapai mungkin berdjumlah 6 × 200.000 × f 150,— = f 180.000.000.

Djuga apabila bisa dilakukan penghematan dalam tentara buat tahun ini, maka penghematan itu kiranja bisa berdjumlah berpuluh-puluh djuta rupiah pula.

Disamping keharusan mengadakan rasionalisasi itu, perlu dikemukakan disini, bahwa perbedaan jang besar antara peraturan2 gadji Pemerintah prae-federal (B.A.G.) dan peraturan2 gadji Republik (P.G.P.), merupakanlah suatu penghalang jang hebat dalam usaha mengadakan koordinasi dan peleburan, dimana perlu, diantara dan daripada djawatan2 RIS dan djawatan2 RI.

Dengan putusan2 Pemerintah, seperti jang sudah diumumkan pada tanggal 23 Djanuari dan 3 Februari j.b.l., maka Pemerintah telah mentjoba menghilangkan sedapat-dapatnja perbedaan jang besar itu antara peraturan2 gadji Republik dan peraturan2 gadji Pemerintah prae-federal.

Jang diambil sebagai pedoman ialah peraturan gadji pegawai Republik karena perbandingan jang terdapat didalamnja antara gadji jang paling rendah dan gadji jang paling tinggi adalah lebih tjotjok dengan keadilan sosial.

Tetapi mau tak mau, maka niveau jang lebih tinggi bagi gadji pegawai2 federal golongan atasan, memaksalah Pemerintah untuk menerima baik, (meskipun dengan perobahan kebawah), putusan Pemerintah

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

R.I. utuk menaikkan gadji-gadji pokok setjara integral dengan 75%, jang oleh Pemerintah R.I.S. dirobah mendjadi 50% mulai bulan Djuli j.a.d.

Meskipun dalam gadji-gadji pegawai federal penjesuaian dengan peraturan gadji-gadji Republik, membawa sedikit penghematan (l.k. 3 djuta rupiah satu bulan), tetapi bagi pegawai-pegawai jang biasa digadji menurut peraturan-peraturan gadji Republik, kenaikan gadji pokok dengan 50% itu, akan memberatkanlah anggaran belandja dengan ± 240.000 × f 75.— sebulan = f 18 djuta rupiah.

Dalam angka-angka ini belum termasuk penambahan tundjangan keluarga, jang menurut taksiran akan menggagalkan penghematan dalam gadji pegawai-pegawai federal, dan menambah kekurangan dalam pengeluaran personeel bagi pegawai-pegawai Republik, jang mungkin bisa ditaksir sebesar 240.000 × f 50,— = f 12.000.000,— tiap-tiap bulan.

Djadi, Tuan-tuan, bagaimanapun djuga, dengan pengeluaran personeel jang luar biasa itu, bagi Pemerintah tak mungkin mengadakan perbaikan gadji lebih dari jang sekarang telah tertjapai, terutama bagi golongan-golongan pegawai rendahan, sebelum djumlah pegawai dapat diturunkan setjara rasioneel.

Ada satu hal jang perlu saja terangkan djuga: Dengan perobahan gadji jang telah dilakukan dan jang akan disusun selandjutnja oleh Djawatan Urusan Pegawai dibawah pangawasan dan pentundjuk-petundjuk suatu panitia-gadji jang terdiri atas Menteri-menteri Keuangan, Perburuhan dan Sosial, hingga merupakan suatu peraturan gadji jang baru,

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

maka terdapatlah suatu perbedaan jang besar antara gadji pegawai-pegawai bangsa I n d o n e s i a dan pegawai-pegawai bangsa Belanda.

Perbedaan gadji antara pegawai-pegawai bangsa Indonesia dan pegawai-pegawai bangsa Belanda ini, jang gadjinja didjamin oleh Konperensi Medja Bundar, mungkin mendjadi penghalang bagi pegawai-pegawai Indo-Belanda dan Tionghoa utuk mendjadi warga negara Indonesia. Tetapi saja harap hal itu djanganlah mendjadi penghalang! Sebab Negara kita tidak berhadjat akan warga negara jang hanja ingin merasakan madu daripada negeri ini, tetapi tidak sanggup menghadapi lebahnja.

Bahkan kepada pegawai-pegawai bangsa Indonesia saja berkata: Meskipun perbedaan gadji itu dirasanja pahit sekali oleh pegawai-pegawai bangsa kita, mungkin dihari-hari j.a.d. mereka, beserta rakjat pada umumnja, harus menelan lagi hal-hal jang tidak kurang pahitnja! Sebab hal ini tidak bisa dielakkan, apabila kita hendak menjehatkan keuangan negara, untuk meletakkan sendi-sendi jang kuat bagi pembangunan Negara kita seterusnja. Jah, perdjoangan kita belum berachir, dan perdjoangan berarti korban. Terutama terhadap golongan pegawai negeri jang biasa disebut kaum non-cooperatór, dan jang telah lama menahan penderitaan dan tekanan-hidup jang berat, pada saat ini saja menjatakan sekali lagi penghargaan jang sebesar-besarnja. Nama saudara-saudara akan tetap harum buat selama-lamanja!

2. Sidang jang terhormat! Djalan-djalan lain apakah jang dapat kita tempuh untuk memperketjil

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

kekurangan penerimaan R.I.S.? Saja tadi menjebutkan hal rasionalisasi. Maka djalan jang kedua ialah:

Menjelidiki lebih teliti anggaran negara-negara-bagian, dan mengusahakan, supaja kekurangannja dapat diperketjil seketjil-ketjilnja. Dalam tahun 1950 subsidi kepada negara-negara-bagian, menurut susunan anggaran pertama, berdjumlah tidak kurang dari f 1000 djuta. Djumlah ini mungkin dapat dikurangi apabila ada koordinasi jang lebih baik antara R. I. S. dan negara - negara - bagian, hingga pengeluarannja dapat diperhemat dan penerimaannja dapat bertambah.

3. Me-intensiveer pemungutan berbagai iuran dan tjukai. Tetapi usaha ini, karena kerugian didalam bulan-bulan pertama, mungkin tak dapat menambah djumlah penerimaan jang dirantjangkan semula.

4. Mengadakan padjak baru, jaitu padjak peredaran (omzetbelasting), jang sebenarnja sebagian besar sedjak bulan September 1949 sudah didjalankan oleh Pemerintah prae-federal, tetapi belum disahkan dengan Undang-undang. Penerimaan ditaksir ± f 125.000.000,— untuk 10 bulan.

5. Mengadakan pindjaman nasional. Tetapi pada masa sekarang pindjaman seperti jang telah dilakukan dimasa perdjoangan, mungkin tak dapat dilakukan.

Dengan usaha-usaha seperti jang telah diuraikan diatas, mungkin Pemerintah bisa berhasil menekan

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

kekurangan dari djumlah f 2,65 miljard itu sampai f 1,5 atau minimum f 2 miljard.

Maka untuk menutup kekurangan ini, barulah kita menempuh djalan jang terachir.

6. Kemungkinan jang terachir itu ialah mengadakan pindjaman diluar negeri.

Kemungkinan jang pertama ialah pindjaman dari Negeri Belanda. Menurut kiraan, balans pembajaran Indonesia tahun 1950 akan berdjumlah pengeluaran l.k. f 2.166 djuta, dan penerimaan f 1.670 djuta. Djadi ada kekurangan buat tahun 1950 sebesar f 496 djuta atau bulatnja f 500 djuta.

Kekurangan ini buat bagian besar disebabkan karena pembajaran-pembajaran kepada Negeri Belanda, sedjumlah f 385 djuta. Mungkin ada harapan, bahwa Nederland suka memberi pindjaman sebesar f 400 — f 500 djuta.

Dan kemungkinan kedua ialah Amerika Serikat. Tetapi sampai dimana ada kemungkinan untuk mendapatkan „general purpose loans", jaitu pindjaman jang tjara pemakaianja diserahkan kepada jang memindjam, masih mendjadi pertanjaan.

Pindjaman seperti jang sekarang diusahakan pada Export-Import-bank oleh Menteri Kemakmuran, Ir. Djuanda, merupakan apa jang dinamakan „spesial-project-loans", jaitu pindjaman-pindjaman untuk usaha-usaha pembangunan jang tertentu.

Selain dari jang tersebut tadi, ada djuga kemungkinan memindjam kepada negeri atau golongan negeri

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

lain, jang telah menundjukkan persediaan mereka memberikan pindjaman.

Tetapi, tiap-tiap pindjaman membawa beban jang memberati tanggungan negara! Sebab itu, sebelum melakukan pindjaman, ditindjaulah dahulu semasak-masaknja.

Selain dari pada pindjaman kapital untuk pembangunan, jang hasilnja baru kemudian dapat dipungut, maka pada saat sekarang ini, berhubung dengan defisit dalam anggaran belandja, Pemerintah perlu akan pindjaman luar negeri untuk pembeli barang-barang keperluan hidup rakjat. Misalnja: pembeli textil jang murah diluar negeri ; pembeli beras; pembeli obat-obatan dan lain-lainnja, jang sangat diperlukan oleh rakjat. Kalau pindjaman ini diperoleh, berturut-turut untuk tiga tahun, maka kita dapat mengelakkan bahaja inflasi jang diakibatkan oleh defisit tersebut.

Pindjaman jang achir ini akan diusahakan djuga oleh Pemerintah, terutama — seperti disebut tadi — untuk mentjegah mendjalarnja inflasi jang sudah beberapa tahun berdjalan dan jang akan lebih menghebat lagi, apabila kekurangan anggaran tahun 1950 tidak dapat ditutup seluruhnja atau buat sebagian besar.

Dan pada achirnja, Tuan-tuan, hanja dengan bertambahnja produksilah, jang dapat membuka mata-pentjaharian baru dan menggantikan import dari berbagai barang-barang keperluan rakjat serta pengluasan export, dapat kita lambat laun memperke-

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

tjil segala kekurangan perbelandjaan negara, serta membajar pentjitjilan dan bunga dari pada berbagai hutang-hutang negara.

Tetapi usaha mempertinggi produksi dan export tidak akan berhasil sepenuhnja, apabila Pemerintah tidak dapat menghentikan inflasi. Oleh karena itu mesti ada pindjaman, jang terutama dipergunakan untuk menutup kekurangan belandja, jang mendjadi sebab jang terpenting dari pada inflasi itu.

Apabila kedua matjam pindjaman itu kita peroleh, maka dalam tempo lima tahun Insja Allah Indonesia sudah sehat kembali, dan bisa merupakan suatu benteng ekonomi jang kuat bagi dunia !

Dan apabila usaha untuk memperoleh pindjaman konsumtif dari luar itu gagal, maka jah, bagi Pemerintah tidak ada djalan lain dari pada memperhebat usaha2 lainnja, jaitu penghematan pembelian2 diluar negeri, rasionalisasi dan sebagainja, seperti jang telah diuraikan tadi untuk mereduceer kekurangan anggaran sampai kepada batas-batas terachir.

Dalam pada itu, perusahaan-perusahaan partikulir, apabila diberi kesempatan jang luas untuk bergerak didalam batas-batas kewadjiban sosial terhadap kaum buruh dan rakjat, akan dapat memberi sumbangan jang tidak ketjil untuk meringankan beban Pemerintah dengan menempatkan tenaga-tenaga jang berkelebihan didalam perusahaan-perusahaannja itu.

Oleh karena itu, maka lebih djelaslah lagi, betapa pentingnja adanja keamanan dan ketertiban diseluruh

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Indonesia, agar supaja kaum perusahaan, baik nasional (jang belum berarti) maupun asing, tidak segan-segan menanam perusahaannja di Indonesia.

Dalam phase pertama sedjak penjerahan kedaulatan kepada bangsa Indonesia, kepentingan-kepentingan negara dan kaum perusahaan asing, buat sebagian besar masih berdjalan parallel.

Antagonisme antara kepentingan negara dan kepentingan perusahaan asing, baru akan nampak dengan lebih djelas, apabila bangsa Indonesia lambat laun sudah dapat membentuk modal nasional sendiri. Pada masa sekarang negara kita masih membutuhkan bantuan dari pada modal luar negeri, kalau kita tidak menghendaki merosotnja deradjat hidup bagi seluruh golongan masjrakat kita.

Kalau hal ini dapat diinsafi oleh rakjat kita, maka apabila ada goodwill pada kedua belah pihak, kaum buruh dan tani bangsa Indonesia pada satu pihak, dan kaum madjikan bangsa asing pada lain pihak, maka bisalah ditjapai buat masa j.a.d. suatu perdamaian-kerdja (arbeidsvrede) jang penting sekali bagi pembangunan negara.

Sidang jang terhormat! Sekarang; Last but not least sepatah kata tentang pembentukan hukum baru!

Dasar Negara, jang tertjantum dalam ajat 1 pasal 1 Konstitusi R.I.S., bahwa Negara kita adalah suatu negara-hukum, akan kita selenggarakan sedemikian rupa, sehingga dasar itu akan mendjadi kenjataan jang senjata-njatanja. Dalam pada itu kita menghadapi tugas untuk membentuk Tata-hukum

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

baru, jang sesuai dengan kedudukan Negara kita sebagai negara jang merdeka dan berdaulat. Dengan sendirinja politik hukum pemerintah akan ditudjukan kepada tertjapainja susunan hukum nasional jang terutama bersandar kepada Pantja Sila, jang memenuhi kebutuhan masjarakat Indonesia dan jang bersifat modern pula, artinja jang sesuai dengan aliran zaman, pun pula sesuai dengan hukum jang umum berlaku dan dihormati dalam hubungan-hubungan internasional.

Langkah pertama jang didjalankan oleh Pemerintah dalam lapangan Kehakiman ialah mempeladjari keadaan Tata-hukum Indonesia pada waktu penjerahan kedaulatan, spesial dalam lapangan perdata dan pidana, menjelidiki, bagian hukum mana jang masih berlaku menurut pasal 192 Konstitusi R.I.S., dan bagian hukum mana jang telah hilang kekuatannja berhubung dengan penjerahan kedaulatan. Dari hukum jang masih berlaku itu, akan diselidiki pula, mana jang harus segera ditjabut, dirobah atau diganti, berhubung dengan i d e o l o g i - i d e o l o g i b a r u daripada R.I.S.

Perlu kiranja ditjatat, bahwa menurut pasal 24 ajat 1 Konstitusi kita, Penguasa tidak akan mengikatkan keuntungan atau kerugian kepada termasuknja warga negara dalam sesuatu golongan rakjat, sedang perbedaan dalam kebutuhan masjarakat dan kebutuhan hukum golongan-golongan rakjat akan diperhatikan dengan semestinja.

Perlu pula diperingatkan bunjinja pasal 7 ajat 2

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Konstitusi, bahwá segala orang berhak menuntut perlakuan dan perlindungan jang sama oleh Undang-undang.

Sidang jang terhormat! Saja mendo'a kepada Allah jang Maha Kuasa serta Maha Murah, supaja melimpahkan rahmat-Nja dan berkat-Nja kepada Sidang parlemen ini. Mudah-mudahan perundingan Tuan-tuan senantiasa didasarkan pada kebidjaksanaan dan pertimbangan jang ichlas dan adil, dengan terutama berpedoman kepada kepentingan negara, keselamatan rakjat, kesedjahteraan masjarakat!

Dengan uraian ini, maka saja menjatakan sidang Parlemen R.I.S. pertama ini dibuka !

Merdeka !

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA


PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Pertj. R.I. DK.